

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada SKPD di Kabupaten Jember

Influence of the Competence of Human Resources and Utilization of Information Technology on the Quality of Government Financial Statements on Local Work Unit in Jember Regency

Rhintya Anggun F.M
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: rhintyaanggunf@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, serta menguji pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari hasil pengisian kuesioner oleh responden. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Jember. Pengambilan sampel dilakukan dengan *purposive sampling*. Jumlah SKPD yang ada di Kabupaten Jember adalah 33 SKPD. Namun dalam penelitian ini hanya menggunakan 30 SKPD, hal ini dikarenakan terdapat tiga SKPD yang tidak memberikan ijin untuk dijadikan sebagai objek penelitian. Alat analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda (*multiple regression analysis*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumberdaya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Dan, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Kata Kunci: *kompetensi sumberdaya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan kualitas laporan keuangan daerah*

Abstract

This research aims to test the effect of the competence of the human resources on the quality of local government financial statements, and also test the effect of the utilization of technology information on the quality of local government financial statements. The data used in this study are primary data obtained the result of questionnaires by respondents. The population in this study were staff who worked at the Local Work Unit in Jember Regency. Sampling was done by purposive sampling. Number of Local Work Unit in Jember Regency is 33 units. However, in this study only used 30 SKPD, because there are three Local Work Unit are not given permission to serve as the object of research. Statistical analysis tools used multiple regression analysis . The result of this research shows that the competence of human resources positive effect on the quality of local government financial statements. And, the utilization of information technology also have positively effects the quality of local government financial statements.

Keywords: *competence of human resources, utilization of information technology, and quality of local government financial statements*

Pendahuluan

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan adalah produk akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan. Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntansi publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik. Salah satunya adalah informasi

akuntansi yang berupa laporan keuangan. Perkembangan akuntansi sektor publik yang semakin pesat menimbulkan tuntutan yang lebih besar terkait dengan dilakukannya transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga sektor publik (Mardiasmo, 2006).

Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010. Laporan keuangan pemerintah kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh badan pemeriksa keuangan (www.bpk.go.id). Salah satu

upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. Kualitas informasi dalam laporan keuangan pemerintah tersebut sangat dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap standar akuntansi dan didukung oleh sebuah sistem akuntansi yang handal (Mardiasmo, 2006).

Banyak pihak yang akan mengandalkan informasi dalam laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi tersebut harus bermanfaat bagi para pemakai sama dengan mengatakan bahwa informasi harus mempunyai nilai (Suwardjono, 2006). Informasi akan bermanfaat kalau informasi tersebut dipahami dan digunakan oleh pemakai dan juga bermanfaat kalau pemakai mempercayai informasi tersebut. Kebermanfaatannya merupakan suatu karakteristik yang hanya dapat ditentukan secara kualitatif dalam hubungannya dengan keputusan pemakai dan keyakinan pemakai terhadap informasi. Kriteria ini secara umum disebut karakteristik kualitatif (*qualitative characteristics*) atau kualitas (*qualities*) informasi (Suwardjono, 2006).

Laporan keuangan merupakan media bagi sebuah entitas dalam hal ini pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diterapkan saat ini harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005, dijelaskan bahwa laporan keuangan berkualitas itu memenuhi karakteristik: Relevan, Andal, Dapat dibandingkan, dan Dapat dipahami. Oleh karena itu, dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten untuk menghasilkan sebuah Laporan Keuangan yang berkualitas.

Untuk menghasilkan Laporan Keuangan Daerah yang berkualitas dibutuhkan SDM yang memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintahan, keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan (Sutrisno, 2009). Hal lain yang perlu diperhatikan adalah kompetensi aparatur pemerintah daerah yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan dalam hal ini pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan diarahkan pada peningkatan kompetensi yang dibutuhkan. Terbatasnya pegawai yang berlatar belakang pendidikan bidang akuntansi menjadikan kurangnya pemahaman/penguasaan aparatur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam mengelola keuangan daerah dengan baik dan benar (Ulum, 2009).

Dalam mewujudkan tata kelola yang baik, pemerintah daerah harus melakukan upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah mengatur semua aspek teknis mencakup bidang peraturan, kelembagaan, sistem informasi keuangan daerah, dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) (Wahyono, 2005:12).

Aspek lain yang mempengaruhi kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah pemanfaatan teknologi informasi. Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban

untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah (IKD) kepada pelayanan publik. Dengan kemajuan teknologi informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, maka dapat membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola, dan mendayagunakan informasi keuangan daerah secara cepat dan akurat. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah. Manfaat yang ditawarkan oleh suatu teknologi informasi antara lain kecepatan pemrosesan transaksi dan penyiapan laporan, keakuratan perhitungan, penyimpanan data dalam jumlah besar, biaya pemrosesan yang lebih rendah (Ariesta, 2013).

Seiring diberlakukannya otonomi daerah pada tanggal 1 Januari 2001 melalui UU No. 22 Tahun 1999 yang telah direvisi dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, reformasi aspek keuangan negara baik di pemerintah pusat dan pemerintah daerah pun berlaku dengan keluarnya UU No. 25 tahun 1999 yang telah direvisi UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Tidak berhenti hanya sampai di situ, selanjutnya reformasi pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah salah satunya ditetapkan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pada UU No. 17 Tahun 2003 tersebut khususnya pada pasal 31, disebutkan bahwa Gubernur/Bupati/Wali Kota menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Ketika BPK memberi Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), artinya dapat dikatakan bahwa Laporan Keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa yaitu: Opini wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TP), dan Pernyataan Menolak memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP) (www.bpk.go.id).

Masih buruknya pembenahan pengelolaan keuangan baik di pemerintah pusat maupun daerah saat ini tidak terlepas dari faktor penerapan standar akuntansi pemerintahan yang masih tergolong baru di lingkungan pemerintah. Adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memahami mekanisme penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan menjadi kendala dalam mewujudkan LKPD yang berkualitas. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang baik pemerintah daerah harus menyampaikan laporan pertanggung jawaban pemerintah yang baik dan benar dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku umum (Mardiasmo, 2006).

Darno (2012) dan Winidyaningrum (2010) membuktikan secara empiris bahwa kemampuan Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang dinyatakan dengan

ketepatanwaktuan dan keterandalan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), sedangkan menurut Sukmaningrum (2012) membuktikan secara empiris Sumber Daya Manusia dengan sistem kontrol terhadap Sumber Daya Manusia, dan pendidikan tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk menguji kembali pengaruh kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian lain dilakukan oleh BPK (Nazir, 2009), yang memberikan temuan empiris bahwa 76,77% unit pengelola keuangan di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah diisi oleh pegawai yang tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi sebagai pengetahuan dasar yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa kualitas Sumber Daya Manusia yang ada di instansi pemerintahan masih belum memadai. Kualitas Sumber Daya Manusia yang minim ini mungkin memiliki pengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan. Winidyaningrum (2010) dalam penelitiannya juga memperoleh hasil yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah melalui pengendalian intern akuntansi. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian tersebut didukung oleh temuan penelitian Afrianti (2011) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Darno (2012), Winidyaningrum (2010), dan Sukmaningrum (2012) adalah pada pemilihan variabel independen yang digunakan, yaitu kemampuan Sumber Daya Manusia dan pemanfaatan teknologi informasi. Sedangkan perbedaannya adalah pada variabel dependen yang digunakan. Dalam penelitian sebelumnya, Darno (2012) menggunakan variabel dependen kualitas laporan barang kuasa pengguna, Winidyaningrum (2010) menggunakan variabel dependen keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah dengan variabel intervening pengendalian intern akuntansi, Sukmaningrum (2012) kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Perbedaan lainnya terletak pada objek penelitian. Jika Darno (2012) meneliti satuan kerja pemerintah pusat di wilayah kerja KPPN Malang, Winidyaningrum (2010) meneliti pemerintah daerah Subosukawonosraten, Sukmaningrum (2012) meneliti Pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang, maka penelitian ini akan meneliti Satuan Kerja Pemerintah Daerah di Kabupaten Jember.

Penelitian ini akan dilakukan pada SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Alasan penelitian ini dilakukan di Jember adalah bahwa sesuai dengan hasil audit BPK bahwa kabupaten Jember pernah menyandang opini TW (tidak wajar) selama tiga tahun berturut-turut yaitu terhitung mulai tahun 2006 hingga 2008. Hal ini berarti terdapat penyebab yang mengakibatkan auditor memberi penilaian berupa ketidakwajaran tersebut.

Adapun beberapa hal penyebab ketidakwajaran tersebut

antara lain lemahnya sistem pengendalian intern pemerintah, kualitas Sumber Daya Manusia yang masing-masing belum memadai sehingga ada ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan keterlambatan penyampaian laporan keuangan dan jumlah Sumber Daya Manusia terkait dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan, dan sistem informasi keuangan penyampaian LKPD (www.bpk.go.id).

Pemerintah Jember berusaha untuk memperbaiki kinerja serta laporan keuangannya, berbagai upaya pun dilakukan sehingga pada tahun 2009 Jember berhasil mendapat opini WDP (wajar dengan pengecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan hasil pemeriksaan (LHP) penggunaan APBD, akan tetapi hal ini masih belum bisa dikatakan memuaskan. Dalam tiga tahun berturut-turut yaitu mulai tahun 2009 hingga 2011, Jember masih mendapat opini WDP, sehingga pengelolaan keuangan daerah harus dibenahi agar opini tersebut meningkat menjadi WTP. Pemkab Jember telah melakukan upaya peningkatan kinerjanya hingga pada tahun 2012 yaitu Wajar Tanpa Pengecualian hal ini merupakan bentuk kerja keras dari upaya yang dilakukan oleh Pemkab Jember dalam berusaha meningkatkan LKPD-nya (www.bpk.go.id).

Hasil audit BPK tersebut secara langsung mengarah pada SKPD selaku pihak yang menyusun laporan keuangan. Ketika opini yang diperoleh pemda adalah tidak wajar, maka laporan keuangan pemda dianggap tidak memiliki nilai informasi. Hal tersebut dikarenakan tugas dan fungsi BPK sebagai pemeriksa keuangan yang memastikan bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material dan telah mematuhi ketentuan perundang-undangan. Jika tidak memenuhi kriteria tersebut, maka opini tidak wajar akan diberikan oleh BPK yang sekaligus menegaskan bahwa laporan tersebut tidak patut menjadi dasar pengambilan kebijakan atau tidak memiliki nilai informasi untuk pengambilan keputusan (Ulum, 2009).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jember salah satu yang mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada SKPD di Kabupaten Jember**".

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, serta menguji pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Metode Penelitian

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu penggunaan data yang berasal dari sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2010). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer yang diperoleh adalah hasil pengisian kuesioner oleh responden, yaitu Pimpinan/Kepala SKPD dan Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Jember.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Jember yang melayani kepentingan masyarakat. Pengambilan sampel dilakukan dengan *purposive sampling* (pemilihan sampel bertujuan) yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Adapun pertimbangannya adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan/kepala SKPD dan bagian keuangan SKPD Kabupaten Jember
 2. Kepala bagian keuangan SKPD Kabupaten Jember
- Jumlah SKPD yang ada di Kabupaten Jember adalah 33 SKPD. Namun dalam penelitian ini hanya menggunakan 30 SKPD, hal ini dikarenakan terdapat tiga SKPD yang tidak memberikan izin untuk dijadikan sebagai objek penelitian. Ketiga SKPD yang dimaksud adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Dinas Pasar, dan Bagian Hukum. Berikut ini daftar SKPD yang ada di Kabupaten Jember.

Metode Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan alat analisis statistik yakni analisis regresi berganda (*multiple regression analysis*). Analisis ini bertujuan untuk menghitung besarnya pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen dan memprediksi variabel dengan menggunakan dua atau lebih variabel dependen (Ghozali, 2005) Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh kualitas Sumber Daya Manusia dan pemanfaatan teknologi terhadap kualitas laporan keuangan.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Kualitas Laporan Keuangan

α = Konstanta

β_{1-2} = Koefisien Regresi

X_1 = Kualitas Sumber Daya Manusia

X_2 = Pemanfaatan Teknologi Informasi

e = Error

Pengujian hipotesis yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial adalah dengan menggunakan uji t.

Hasil Penelitian

Statistik Deskriptif

Deskripsi variabel penelitian berguna untuk mendukung hasil analisis data. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan

teknologi informasi, dan kualitas laporan keuangan. Berikut ini disajikan statistik deskriptif untuk masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 1. Statistik deskriptif variabel penelitian

Var	Min	Maks	Rata-Rata
Komp. SDM	27	72	61,33
Pemanfaatan TI	16	40	33,65
Kualitas LK	11	50	41,80

Sumber: Lampiran 5

Berdasarkan Tabel 1 dapat dijelaskan bahwa berkaitan dengan variabel kompetensi sumber daya manusia mempunyai nilai skor minimum sebesar 27 dan skor maksimum sebesar 72. Adapun nilai rata-ratanya sebesar 61,33.

Berkaitan dengan variabel pemanfaatan teknologi informasi mempunyai nilai skor minimum sebesar 16 dan skor maksimum sebesar 40. Adapun nilai rata-ratanya sebesar 33,65.

Berkaitan dengan variabel kualitas laporan keuangan mempunyai nilai skor minimum sebesar 11 dan skor maksimum sebesar 50. Adapun nilai rata-ratanya sebesar 41,80.

Analisis Regresi Linier Berganda

Pengujian regresi linear berganda berguna untuk mengetahui tingkat pengaruh variabel independen (kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi) terhadap variabel dependen (kualitas laporan keuangan). Berdasarkan pengujian dengan bantuan program *SPSS for Windows* diperoleh hasil yang dapat disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	Koef.	thitung	Sig.
Konstanta	-2,247	-0,491	0,625
Komp. SDM	0,447	5,702	0,000
Pemanfaatan TI	0,494	3,989	0,000
R			0,789
R Square			0,622
Adj R Square			0,609
Standar Error			3,903
Fhitung			46,925
Fsig			0,000

Sumber: Lampiran 6

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F adalah uji kelayakan model (*goodness of fit*) yang digunakan untuk menguji apakah model regresi yang kita buat signifikan atau non signifikan. Jika model signifikan maka model bisa digunakan untuk prediksi atau peramalan, sebaliknya jika tidak signifikan maka model regresi tidak bisa digunakan untuk peramalan (Ghozali, 2009). Pengujian

dilakukan dengan menggunakan *significance level* 0,05 ($\alpha = 5\%$). Berdasarkan hasil regresi dapat dilihat bahwa F_{hitung} sebesar 46,925 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena diperoleh nilai signifikansi yang lebih kecil 0,05, maka model regresi yang diperoleh dari pengujian bisa digunakan untuk prediksi atau peramalan, dalam hal ini nilai prediksi mampu menggambarkan kondisi sesungguhnya.

Koefisien Determinasi Berganda (R^2)

Nilai koefisien determinasi berganda (R^2) dimaksudkan untuk mengetahui besarnya sumbangan dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Nilai koefisien determinasi terletak antara 0 dan 1. Apabila R square atau $R^2 = 1$, maka garis regresi dari model tersebut memberikan sumbangan sebesar 100% terhadap perubahan variabel terikat. Apabila $R^2 = 0$, maka model tersebut tidak bisa mempengaruhi atau tidak bisa memberikan sumbangan terhadap perubahan variabel terikat. Kecocokan model akan semakin lebih baik apabila mendekati satu.

Berdasarkan hasil analisis yang bisa dilihat pada Tabel 2 diperoleh hasil koefisien determinasi berganda (Adj. R^2) sebesar 0,609, hal ini berarti 60,9% perubahan kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh variabel kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi sedangkan sisanya sebesar 39,1% disebabkan oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam persamaan regresi yang dibuat.

Uji t

Uji ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Caranya adalah dengan membandingkan nilai statistik t_{hitung} dengan nilai statistik t_{tabel} dengan tingkat signifikan (α) yang digunakan yaitu 5%. Masing-masing variabel bebas dikatakan mempunyai pengaruh yang signifikan (nyata) apabila apabila probabilitas $< 5\%$ (α):

Tabel 3. Hasil Uji t

Model	t	Sig	Keterangan
Komp. SDM	5,702	0,000	Signifikan
Pemanfaatan TI	3,989	0,000	Signifikan

Sumber: Lampiran 6

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui besarnya pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat sebagai berikut:

1. Pengaruh variabel kompetensi sumber daya manusia (X_1) terhadap kualitas laporan keuangan (Y)

Hasil pengujian untuk pengaruh variabel kompetensi sumber daya manusia (X_1) terhadap kualitas laporan keuangan (Y) diperoleh t_{hitung} sebesar 5,702 dan signifikansi $< \alpha$ yaitu $0,000 < 0,05$. Karena tingkat probabilitasnya lebih kecil dari 5%, maka H_0 ditolak, berarti secara parsial variabel kompetensi sumber daya manusia (X_1) mempunyai pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Satuan

Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Jember (Y). Sehingga, hipotesis yang menyatakan kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah terbukti kebenarannya (H_1 diterima).

2. Pengaruh variabel pemanfaatan teknologi informasi (X_2) terhadap kualitas laporan keuangan (Y)

Hasil pengujian untuk pengaruh variabel pemanfaatan teknologi informasi (X_2) terhadap kualitas laporan keuangan (Y) t_{hitung} sebesar 3,989 dan signifikansi $< \alpha$ yaitu $0,000 < 0,05$. Karena tingkat probabilitasnya lebih kecil dari 5%, maka H_0 ditolak, berarti secara parsial variabel pemanfaatan teknologi informasi (X_2) mempunyai pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Jember (Y). Sehingga, hipotesis yang menyatakan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah terbukti kebenarannya (H_2 diterima).

Pembahasan

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil uji regresi menunjukkan variabel kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini berarti faktor kompetensi sumber daya manusia yang diukur melalui kemampuan dari staf bagian akuntansi/keuangan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan latar belakang pendidikan, pelatihan yang diperoleh responden, pemahaman mengenai tugas, dan tanggung jawab terhadap kewajiban merupakan suatu faktor yang menentukan kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Jember.

Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Darno (2012) yang menyatakan bahwa kemampuan Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan barang kuasa pengguna. Hasil penelitian ini juga sesuai dan mendukung hasil penelitian Ariesta 2013 melakukan yang menyatakan bahwa kesiapan sumberdaya manusia yang menghasilkan bahwa kualitas sumber daya manusia mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas laporan keuangan

Hasil uji regresi menunjukkan variabel pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini berarti faktor pemanfaatan teknologi informasi yang diukur melalui adanya pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat merupakan suatu faktor yang menentukan

kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Jember.

Hasil penelitian ini didukung dengan hasil penelitian Darno (2012) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan barang kuasa pengguna. Hasil penelitian ini juga mendukung temuan penelitian yang dilakukan oleh Ariesta (2013) menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Kesimpulan dan Keterbatasan

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan kompetensi sumberdaya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Sehingga, hipotesis yang menyatakan bahwa kompetensi sumberdaya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah terbukti kebenarannya atau H_1 diterima. Adanya pengaruh yang positif dapat diartikan bahwa semakin baik kompetensi sumberdaya manusia maka akan semakin baik pula kualitas laporan keuangan daerah.

Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Sehingga, hipotesis yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah terbukti kebenarannya atau H_2 diterima. Adanya pengaruh yang positif dapat diartikan bahwa semakin baik pemanfaatan teknologi informasi maka akan semakin baik pula kualitas laporan keuangan daerah.

Keterbatasan

Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan. Keterbatasan-keterbatasan yang di maksud dijelaskan sebagai berikut:

Dalam melakukan penelitian, peneliti tidak melakukan wawancara secara langsung terhadap responden karena metode yang diterapkan adalah metode kuesioner. Sehingga peneliti tidak dapat mengetahui secara langsung situasi dan kondisi responden saat mengisi kuesioner, serta tidak terlibat secara langsung dengan aktivitas yang ada dalam instansi tersebut. Hal ini menyebabkan peneliti tidak mengetahui secara pasti bagaimana kondisi sebenarnya mengenai kompetensi sumberdaya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan kualitas laporan keuangan daerah pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Jember.

Penelitian ini hanya mengujidua variabel yaitu kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

Daftar Pustaka

- Afrianti, Dita. 2011. *Analisis faktor-faktor yang Mempengaruhi nilai informasi Pelaporan keuangan pemerintah Daerah (studi pada Pemda di Kabupaten Batang)*. Tesis. Semarang: Program Pascasarjana UNDIP.
- Ariesta, Fadila. 2013. *Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi, terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Pasaman Barat)*. Skripsi. Padang: Universitas Negeri Padang.
- Darno. 2012. *Analisis Pengaruh Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Barang Kuasa Pengguna (Studi pada Satuan Kerja di Wilayah Kerja KPPN Malang)*. Skripsi. Malang: FE Unibraw.
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mardiasmo. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, Vol. 2 No.1, Hal 1-17.
- Nazir, Moh. 2009. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nordiawan, Dedi. 2008. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmaningrum, Tantriani. 2012. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang)*. Skripsi. Semarang: Program UNDIP.
- Sutrisno, Edi. 2009. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Suwardjono. 2006. *Teori Akuntansi: Perekayasa Pelaporan Keuangan*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPF.
- Ulum, Ihyaul MD. 2009. *Intellectual Capital Konsep dan Kajian Empiris*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wahyono, Teguh. 2005. *Sistem Informasi Akuntansi: Analisis, Desain dan Pemograman Komputer*. Yogyakarta: Andi.
- Winidyaningrum, Celviana dan Rahmawati. 2010. Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi (Studi Empiris di Pemda SUBOSUKAWONOSRATEN), dalam *Simposium Nasional Akuntansi XIII*. 13-14 Oktober. Purwokerto.

www.bpk.go.id